

## EVALUASI KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (KASUS KABUPATEN NUNUKAN)

Muhammad Miftah Mubarak<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Jurusan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada  
Jl. Grafika No. 2, Sekip, Yogyakarta 55281; 100995mubarak@gmail.com

### Info Artikel:

• Artikel Masuk: 10/03/21

• Artikel diterima: 26/03/21

• Tersedia Online: 30/03/21

### ABSTRAK

Kabupaten Nunukan sebagai salah satu wilayah yang berada pada kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia memiliki paradigma pembangunan dengan fokus pada pembangunan secara fisik guna memacu peningkatan kesejahteraan. Untuk mendukung hal tersebut, maka terdapat beberapa ketentuan yang ditetapkan pada Kabupaten Nunukan yaitu sebagai wilayah PKSN pada Kecamatan Semenggaris dan Nunukan serta wilayah Pulau Sebatik sebagai Wilayah Pengembangan Strategis menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai pusat-pusat pertumbuhan utama di Kalimantan Utara. Penetapan tersebut memacu munculnya pembangunan infrastruktur bagi Kabupaten Nunukan selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa ketersediaan infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Nunukan selama tahun 2015 hingga 2019. Untuk menentukan ketersediaan infrastruktur didasarkan pada Kepmen Kimpraswil No.534. KPTS 2001 dan SNI 03-1733-2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak 2015 hingga 2019 ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Nunukan seperti infrastruktur jalan, pertokoan, pasar, SMP dan perguruan tinggi sudah memenuhi standar sedangkan untuk infrastruktur listrik, air bersih, SD, SMA/SMK dan klinik secara keseluruhan belum mampu untuk memenuhi standar ketersediaan. Pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Nunukan, jumlah pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan, dan pendapatan selalu mengalami peningkatan setiap tahun sedangkan permasalahan seperti tingkat pengangguran memiliki jumlah yang naik turun sejak tahun 2015 hingga 2019 dan tingkat kemiskinan sejak tahun 2015 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

**Kata Kunci** : Kawasan Perbatasan; Evaluasi; Infrastruktur

### ABSTRACT

Kabupaten Nunukan as one of the regions in the border area of Indonesia-Malaysia has a development paradigm with a focus on physical development to spur increased welfare. To support of this, several provisions have been established to Kabupaten Nunukan namely as PKSN in Kecamatan Semenggaris, Kecamatan Nunukan and Pulau Sebatik as a Strategic Development Regions making Kabupaten Nunukan as the main growth centers in North Kalimantan. This determination has spurred the appearance of infrastructure development for Kabupaten Nunukan in the last few years. This study aims to identify and analyze social and economic infrastructure as well as the socio-economic conditions of the public in Kabupaten Nunukan during 2015 to 2019. To determine the availability of infrastructure, it is based on Kepmen Kimpraswil No.534. KPTS 2001 and SNI 03-1733-2004. The results of this study, in the availability of infrastructure in 2015 to 2019 in Kabupaten Nunukan such as road infrastructure, shops, markets, junior high schools and universities that have met the standards, while electricity, clean water, elementary schools, high schools/ vocational schools and clinics as a whole have not been able to meet the standards availability. In the socio-economic conditions of the public of Kabupaten Nunukan, the amount of community work, education level, and income has always increased every year, while the problems such as the unemployment rate have fluctuated from 2015 to 2019, and the poverty rate from 2015 to 2019 has always increased every year.

**Keyword**: Border area; Evaluation; Infrastructure

### 1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, perubahan paradigma pembangunan kawasan perbatasan

lebih difokuskan pada pembangunan secara fisik guna memenuhi dan mencapai tingkat kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini juga

telah diprogram oleh pemerintah sebagai salah satu tujuan dari pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 yang telah menetapkan arah pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Tujuan dari penetapan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah terutama pada pembangunan antara Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dan wilayah Sabah Malaysia. Pengembangan infrastruktur yang tepat dan karakter yang sesuai dengan wilayah perbatasan darat dapat berdampak pada percepatan pembangunan ekonomi, sehingga meningkatkan daya saing dan mengarah pada peningkatan kesejahteraan sosial (Prasetyo et.al:2013).

Kessides (1993) menyebutkan ada 2 kontribusi yang diberikan dari adanya pembangunan infrastruktur bagi suatu wilayah yaitu infrastruktur berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi seperti adanya pengurangan biaya dalam produksi dan dampak struktural pada permintaan dan penawaran serta infrastruktur berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dengan terciptanya kenyamanan di lingkungan fisik dan adanya output penghargaan dalam hak pribadi. Sari & Rahman (2019) memberikan penjelasan mengenai manfaat yang dapat diperoleh dari pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan bagi masyarakat yaitu membantu masyarakat dengan adanya konstruksi sipil yang membantu pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan ekonomi masyarakat perbatasan dan kemudahan dalam akses. Dalam RPJMN 2004-2009, salah satu strategi untuk kawasan perbatasan adalah dengan mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga, baik dengan menggunakan pendekatan pembangunan melalui peningkatan

kesejahteraan (prosperity approach) maupun keamanan (security approach).

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu wilayah yang masih tergolong kedalam daerah terdepan dan terluar dan berada pada perbatasan Indonesia-Malaysia. Sebagai daerah dikawasan perbatasan, pembangunan wilayah Kabupaten Nunukan diperlukan guna memberikan dampak pada percepatan pengembangan wilayah dan mengurangi ketergantungan dengan wilayah negara Malaysia. Pengembangan wilayah perbatasan negara pada Kabupaten Nunukan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Pulau Sebatik merupakan salah satu wilayah yang menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Nunukan. Fokus pemerintah untuk membangun Pulau Sebatik sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dengan tujuan untuk memajukan daerah tersebut. Program pemerintah yang telah berjalan di Pulau Sebatik dan merupakan salah satu proyek nasional yang sudah terealisasi adalah pembangunan jaringan jalan lingkar Pulau Sebatik yang menghubungkan Sei Nyamuk-Bambangan-Lapau-Tanjung Batu. Pembangunan jalan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan. Pembangunan jalan lingkar Pulau Sebatik berfungsi untuk menghubungkan seluruh kecamatan yang ada di Pulau Sebatik.

Selain itu, fokus pembangunan di Kabupaten Nunukan tidak hanya terfokus pada satu wilayah saja akan tetapi terdapat beberapa wilayah dijadikan target utama untuk pembangunan. Seperti halnya penetapan 2 wilayah yang dijadikan sebagai pusat kegiatan strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan yaitu menetapkan PKSN Simanggaris dan PKSN Nunukan. Dengan adanya penetapan PKSN pada 2 wilayah di Kabupaten Nunukan menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai pusat dari kegiatan yang ada di Kalimantan Utara. Sehingga hal ini menjadikan wilayah Kabupaten

Nunukan berpotensi untuk pembangunan infrastruktur guna mendukung hal tersebut.

Dengan adanya berbagai penetapan dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Kabupaten Nunukan tersebut telah menjadikan kawasan perbatasan mengalami pergeseran paradigma pembangunan pembangunan kawasan perbatasan yang dari sebelumnya berfokus pada keamanan menjadi peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisa kondisi ketersediaan infrastruktur serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Nunukan selama tahun 2015 hingga tahun 2019.

## 2. DATA DAN METODE

### 2.1. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder dan data primer. Beberapa data sekunder yang dipergunakan adalah data jumlah infrastruktur ekonomi seperti jalan, listrik, air bersih, perdagangan dan infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan serta data kondisi sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan, pola pekerjaan, pendapatan perkapita, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Data sekunder yang dikumpulkan merupakan data yang berasal dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Sedangkan untuk data primer merupakan data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan responden yang memiliki dampak langsung dari pembangunan infrastruktur.

### 2.2. Metode Analisis

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan untuk mengevaluasi ketersediaan infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi menggunakan parameter. Analisa yang dilakukan yaitu analisis ketersediaan infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Analisis ketersediaan infrastruktur merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana jumlah dan kondisi infrastruktur di wilayah Kabupaten Nunukan.

Analisis ketersediaan infrastruktur akan dilakukan dengan melakukan survey sekunder yang didapatkan melalui survey instansi terkait untuk mengetahui data jumlah dan persebaran infrastruktur serta fasilitas pendukung infrastruktur yang ada di Kabupaten Nunukan. Analisis ketersediaan infrastruktur akan menggunakan standar yang ditentukan oleh SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan untuk analisis kondisi infrastruktur akan dianalisis menggunakan survei primer berupa observasi langsung untuk melihat bagaimana kondisi bangunan, kondisi fasilitas pendukung, dan tingkat pelayanan infrastruktur infrastruktur. Selain itu juga menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada beberapa masyarakat yang memiliki akses kepada infrastruktur. Analisis kondisi sosial dan ekonomi masyarakat merupakan analisis yang dipergunakan untuk mengetahui gambaran kondisi kehidupan sosial ekonomi dari masyarakat di Kabupaten Nunukan baik dari tingkat tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, tingkat pekerjaan dan pengangguran,

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Analisis Ketersediaan Infrastruktur

#### 1. Analisis Ketersediaan Jalan

Infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Nunukan terdiri dari 3 jenis perkerasan yaitu perkerasan aspal, agregat dan tanah. Untuk menentukan standar dari infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Nunukan digunakan Kepmen Kimpraswil No.534. KPTS 2001.

**Tabel 1.** Ketersediaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Nunukan

Ket.	Panjang Jalan (Km)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jalan	1111.9	877.58	1044.8	1088.7	1132.9

(Sumber: BPS Kabupaten Nunukan)

Berdasarkan data, Infrastruktur jalan di Kabupaten Nunukan sejak tahun 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan. Peningkatan infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor

pendukung keberhasilan dalam pembangunan. Infrastruktur jalan mempunyai peranan penting terutama yang berkaitan dengan perkembangan antar wilayah, memberikan kemudahan dalam pengangkutan orang dan barang, memperlancar perjalanan antar wilayah, dan pemerataan hasil pembangunan. Selain itu, pada kawasan perbatasan, jalan juga dapat berfungsi sebagai salah satu infrastruktur utama untuk pertahanan dan keamanan wilayah. Dengan adanya pembangunan jaringan jalan, maka akan terjadi perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat pada suatu wilayah.

**Tabel 2.** SPM Jalan di Kabupaten Nunukan

Kepmen Kimpraswil No.534 KPTS 2001	Rekomendasi Kepmen Kimpraswil No.534 KPTS 2001
0,6 km/1000 jiwa	349,88 km

(Sumber:Hasil Analisis 2021)

Diketahui bahwa infrastruktur jalan yang direkomendasikan untuk Kabupaten Nunukan sepanjang 349,88 km untuk mendukung penduduk sebanyak 209.922 jiwa. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa infrastruktur jalan di Kabupaten Nunukan sudah memenuhi standar. Akan tetapi kondisi perkerasan jalan pada Kabupaten Nunukan masih di dominasi oleh perkerasan agregat dan tanah sedangkan perkerasan aspal memiliki panjang 222 km.

## 2. Analisis Ketersediaan Listrik

Infrastruktur listrik di Kabupaten Nunukan merupakan suatu hal yang menjadi kebutuhan utama dalam pembangunan wilayah. Kebutuhan listrik terus meningkat seiring dengan penambahan penduduk setiap tahunnya.

**Tabel 3.** Jumlah Sambungan Listrik di Kabupaten Nunukan

Ket.	Jumlah Sambungan Listrik (SR)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Listrik	18.108	21.005	22.752	28.273	30.945

\*Sambungan Rumah

(Sumber:BPS Kabupaten Nunukan)

Pentingnya energi listrik untuk pembangunan, mendorong Kabupaten Nunukan

untuk terus memperluas jangkauan pelayanan dan kapasitas listrik bagi masyarakat setiap tahunnya sehingga sejak tahun 2015 hingga 2019 jumlah sambungan listrik terus mengalami peningkatan. Listrik menjadi salah satu faktor yang menentukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada wilayah perbatasan sehingga pembangunan infrastruktur listrik akan memperoleh prioritas guna menunjang tahapan pembangunan tersebut.

**Tabel 4.** SNI Sambungan Listrik di Kabupaten Nunukan

SNI 03-1733-2004	Rekomendasi SNI 03-1733-2004
100 % Rumah Tangga	56.678 Sambungan Rumah Tangga

(Sumber:Hasil Analisis 2021)

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 standar minimal sambungan listrik di Kabupaten Nunukan adalah 56.678 sambungan rumah tangga. Sehingga hal ini berarti total sambungan listrik yang ada di Kabupaten Nunukan hanya sebanyak 54,6% sambungan dan masih membutuhkan sambungan sebanyak 45,4%. Belum tercukupinya sambungan listrik di Kabupaten Nunukan dikarenakan masih terdapat beberapa kecamatan yang belum memiliki sambungan listrik seperti Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Atulai. Akan tetapi, peningkatan infrastruktur listrik di Kabupaten Nunukan terus dilakukan guna mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.

## 3. Analisis Ketersediaan Air Bersih

Penggunaan air bersih di Kabupaten Nunukan secara umum masih didominasi oleh masyarakat pengguna air yang bersumber dari tampungan air hujan dan sumur bor. Sehingga suplai air bersih yang bersumber dari PDAM belum maksimal

**Tabel 5.** Jumlah Sambungan Air Bersih di Kabupaten Nunukan

Ket.	Jumlah Sambungan Air Bersih (SR)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Air Bersih	6.990	8.249	9.551	11596	14.000

\*Sambungan Rumah

(Sumber:PDAM Kabupaten Nunukan)

Berdasarkan data, air bersih yang berasal dari suplai PDAM Kabupaten Nunukan selalu meningkat sejak tahun 2015 hingga 2019. Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berdampak langsung kepada kesejahteraan sehingga air memiliki peran penting dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas produktivitas dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Nunukan.

**Tabel 6.** SPM Air Bersih di Kabupaten Nunukan

Kepmen Kimpraswil No.534 KPTS 2001	Rekomendasi Kepmen Kimpraswil No.534 KPTS 2001)
55 – 75% penduduk terlayani	115.457 – 157.442 Penduduk (31.172 – 42.508 Sambungan Rumah)

(Sumber:Hasil Analisis 2021)

Berdasarkan ketentuan Kepmen Kimpraswil No.534. sambungan untuk infrastruktur air PDAM masih belum mencukupi standar dikarenakan jumlah sambungan masih belum mencukupi standar minimal yang berjumlah 55%-75% dengan total penduduk terlayani yaitu sebanyak 115.457-157.442 jiwa. Hal ini dikarenakan hanya 6 kecamatan yang memiliki sambungan air bersih PDAM sedangkan masih terdapat 13 kecamatan yang belum memiliki sambungan air bersih PDAM. Akan tetapi, selama 5 tahun terakhir terus dilakukan peningkatan ketersediaan infrastruktur air bersih sehingga jumlah pengguna air bersih PDAM di Kabupaten Nunukan terus meningkat setiap tahunnya.

#### 4. Analisis Ketersediaan Sarana Perdagangan

Untuk infrastruktur perdagangan yang ada di Kabupaten Nunukan didominasi oleh sarana pertokoan dan pasar. Untuk mengetahui ketersediaan infrastruktur perdagangan di Kabupaten Nunukan maka digunakan standar SNI 03-1733-2004.

**Tabel 7.** Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Nunukan

Ket.	Jumlah Bangunan (Unit)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pasar	39	39	39	43	43
Pertokoan	182	182	182	182	182

(Sumber:BPS Kabupaten Nunukan)

Berdasarkan data, infrastruktur perdagangan yang ada di Kabupaten Nunukan selama tahun 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan pada sarana pasar. Adanya pembangunan pada sarana perdagangan dapat menjadi suatu wadah yang berfungsi untuk melayani dan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur perdagangan juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi pada sektor tersebut dan mengurangi ketergantungan terhadap Malaysia.

**Tabel 8.** SNI Sambungan Listik di Kabupaten Nunukan

Ket.	SNI 03-1733-2004	Rekomendasi SNI 03-1733-2004
Pasar	1 Unit/30.000 Jiwa	7 Unit
Pertokoan	1 Unit/6.000 Jiwa	35 Unit

(Sumber:Hasil Analisis 2021)

Untuk pertokoan/supermarket, standar minimal sarana di Kabupaten Nunukan adalah sebanyak 35 unit dan sarana pasar memiliki ketentuan minimal sebanyak 7 unit sehingga kebutuhan akan sarana perdagangan telah terpenuhi.

#### 5. Analisis Ketersediaan Sarana Pendidikan

Kabupaten Nunukan sebagai salah satu wilayah terluar di Indonesia memiliki jenis sarana pendidikan yang tergolong lengkap. Akan tetapi permasalahan sarana pendidikan seperti ketersediaan sarana masih dianggap kurang.

**Tabel 9.** Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Nunukan

Ket.	Jumlah Sarana Pendidikan (Unit)				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD	133	133	131	110	112
SMP	45	45	45	40	46
SMA/SMK	23	23	23	24	26
Perguruan Tinggi	-	-	-	4	4

(Sumber:BPS Kabupaten Nunukan)

Berdasarkan data, hanya sarana SD yang mengalami penurunan jumlah sejak tahun 2015 hingga 2019 sedangkan sarana lainnya mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah sarana pendidikan memiliki tujuan yaitu sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Selain itu, dengan adanya pendidikan, manusia diharapkan mampu untuk mengembangkan diri dan melangsungkan kehidupan guna menhadapai tantangan dimasa depan.

**Tabel 10.** SNI Sarana Pendidikan di Kabupaten Nunukan

Ket.	SNI 03-1733-2004	Rekomendasi SNI 03-1733-2004
SD	1 Unit/1.600 Jiwa	131 unit
SMP	1 Unit/4.800 Jiwa	44 unit
SMA/SMK	1 Unit/4.800 Jiwa	44 unit
Ket.	Kepmen Kimpraswil No.534 KPTS 2001	Rekomendasi Kepmen Kimpraswil No.534 KPTS 2001)
Perguruan Tinggi	1 Unit/70.000 Jiwa	3 unit

(Sumber:Hasil Analisis 2021)

Berdasarkan hasil evaluasi, ketersediaan sarana pendidikan di kabupaten Nunukan belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan masih terdapat beberapa sarana seperti SD dan SMA/SMK yang masih belum memenuhi standar yaitu untuk SD sebanyak 131 unit dan SMA/SMK sebanyak 44 unit. Sedangkan sarana SMP dan perguruan tinggi telah memenuhi standar yaitu sebanyak 44 unit SMP dan 3 perguruan tinggi. Kurangnya ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Nunukan masih perlu ditingkatkan lagi guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Nunukan untuk mendapatkan pelayanan dari infrastruktur sosial.

#### 6. Analisis Ketersediaan Sarana Kesehatan

Kesehatan menjadi hak bagi setiap masyarakat dan merupakan aspek yang mampu menunjang kesejahteraan. Peningkatan kesehatan dapat diwujudkan melalui berbagai

upaya seperti pembangunan sarana prasarana dan penigkatan fasilitas pendukung kesehatan terutama pada Kabupaten Nunukan.

**Tabel 11.** Ketersediaan Sarana Kesehatan di Kabupaten Nunukan

Ket.	Jumlah Sarana Kesehatan (Unit)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rumah Sakit	1	1	1	4	4
Puskesmas	16	16	16	16	16
Posyandu	76	225	225	235	235
Klinik	1	1	1	3	7

(Sumber:BPS Provinsi Kalimantan Utara)

Berdasarkan data, selama tahun 2015 hingga 2019 infrastruktur kesehatan di Kabupaten Nunukan terus ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Peningkatan infrastruktur kesehatan sangat berdampak pada masyarakat dikarenakan masyarakat di Kabupaten Nunukan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan akses pada infrastruktur kesehatan. Selain itu, dengan adanya pembangunan infrastruktur juga akan meminimalisir ketergantungan masyarakat akan fasilitas kesehatan yang ada di Malaysia.

**Tabel 12.** SNI Sarana Kesehatan di Kabupaten Nunukan

Ket.	Kepmen Kimpraswil No.534 KPTS 2001	Rekomendasi Kepmen Kimpraswil No.534 KPTS 2001)
Rumah Sakit	1 Unit/240.000 Jiwa	1 unit
Puskesmas	1 Unit/120.000 Jiwa	2 unit
Posyandu	1 Unit/1.250 Jiwa	168 unit
Klinik	1 Unit/5.000 Jiwa	42 unit

(Sumber:Hasil Analisis 2021)

Berdasarkan hasil evaluasi sarana kesehatan, didapatkan hasil untuk rumah sakit, puskesmas dan posyandu di Kabupaten Nunukan sudah memiliki jumlah yang melebihi standar minimal. Sedangkan hanya sarana klinik saja yang belum sesuai standar. Akan tetapi, ketersediaan sarana kesehatan di kabupaten Nunukan belum mampu memenuhi seluruh

kebutuhan masyarakat dikarenakan persebaran sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Nunukan secara umum juga belum mampu untuk melayani seluruh wilayah. Faktor luasnya wilayah Kabupaten Nunukan menjadikan cakupan pelayanan sarana kesehatan belum merata.

### 3.2. Kondisi Sosial Ekonomi

#### 1. Kondisi Pola Pekerjaan

Pola pekerjaan dapat menjadi dasar dari kedudukan masyarakat untuk mengukur tingkat keberhasilan ekonominya. Pola pekerjaan masyarakat Kabupaten Nunukan di bagi menjadi 6 kategori yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas dan pekerja keluarga/tak dibayar.

**Tabel 13.** Pola Pekerjaan Masyarakat

Ket.	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Berusaha sendiri	26 %	26 %	18 %	25 %	21 %
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	13 %	13 %	10 %	10 %	14 %
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	4 %	4 %	5 %	5 %	4 %
Buruh/Karyawan /Pegawai	42 %	42 %	46 %	50 %	39 %
Pekerja bebas	5 %	5 %	7 %	7 %	12 %
Pekerja keluarga/tak dibayar	10 %	10 %	14 %	3 %	9 %
Jumlah Pekerja	72.182	72182	87319	86227	90943

(Sumber:BPS Kabupaten Nunukan)

Sejak tahun 2015 hingga 2019, pola pekerjaan yang mendominasi di Kabupaten Nunukan adalah pekerjaan buruh/karyawan/pegawai sedangkan pola pekerjaan yang paling sedikit dilakukan masyarakat adalah jenis berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Jumlah pekerja di Kabupaten Nunukan terus meningkat setiap

tahunnya dikarenakan semakin meningkatnya kesempatan kerja untuk masyarakat.

#### 2. Kondisi Tingkat Pendidikan Masyarakat

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia ialah melalui proses pendidikan. Dengan adanya pendidikan, masyarakat Kabupaten Nunukan diharapkan mampu untuk mengembangkan diri dan melangsungkan kehidupan guna menhadapai tantangan dimasa depan.

**Tabel 14.** Tingkat Pendidikan Masyarakat

Ket.	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD	46%	46%	41%	41%	44%
SMP	21%	21%	20%	18%	22%
SMA/S MK	23%	23%	28%	31%	24%
Perguruan Tinggi	10%	10%	10%	9%	10%
Jumlah Penduduk yang Bersekolah	112.719	112.720	133.513	137.914	146.820

(Sumber:BPS Kabupaten Nunukan)

Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Nunukan pada umumnya di dominasi oleh pendidikan dasar sedangkan tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah jenis pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Secara umum, jumlah masyarakat di Kabupaten Nunukan yang bersekolah terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada sarana pendidikan yang telah terbangun maupun sarana pendidikan yang mengalami perbaikan. Selain itu, kondisi akses sarana pendidikan yang ada juga semakin mudah dikarenakan terus meningkatnya prasarana pendukung untuk dapat mengakses sarana pendidikan. Akan tetapi, pendidikan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Nunukan dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat masih didominasi oleh tingkat pendidikan dasar sedangkan tingkat pendidikan menengah ke atas hingga perguruan tinggi nilainya masih kurang dari 50%. Selain itu, permasalahan anak putus sekolah baik pada jenjang SD, SMP dan SMA juga masih terjadi setiap tahunnya.

### 3. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan perkapita merupakan salah satu tolah ukur dalam menentukan keberhasilan dari kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal seperti ini terus meningkat setiap tahunnya pada Kabupaten Nunukan dimana terjadi kenaikan pendapatan masyarakat.

**Tabel 15.** Data Pendapatan Perkapita Kabupaten Nunukan

Ket.	Jumlah Pendapatan				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Perkapita	87,38 3,943	88,94 9,267	103,2 11,12	111,7 17,43	121,0 92,59
			8	2	6

(Sumber:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan)

Pendapatan penduduk perkapita Kabupaten Nunukan memiliki pergerakan positif dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Nunukan dikarenakan adanya faktor utama yaitu peningkatan infrastruktur sehingga berpengaruh pada produksi dan produktivitas masyarakat. Peningkatan produktivitas masyarakat berasal dari pemanfaatan sumberdaya di Kabupaten Nunukan seperti halnya pada sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan yang merupakan sektor penyumbang pendapatan daerah terbesar selama beberapa tahun.

### 4. Kondisi Tingkat Pengangguran

Peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan pada infrastruktur tidak sepenuhnya berdampak pada ekonomi masyarakat. Permasalahan ekonomi seperti pengangguran masih menjadi salah satu masalah yang belum bisa terselesaikan dengan baik di Kabupaten Nunukan.

**Tabel 16.** Data Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nunukan

Ket.	Tingkat Pengangguran (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,78	5,51	7,24	4,85	3,91

(Sumber:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan)

Pendapatan penduduk dan lapangan pekerjaan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Nunukan. Tingkat pengangguran pada Kabupaten Nunukan memiliki pola naik turun dalam 5 tahun terakhir. Tersedianya lapangan pekerjaan baru yang di Kabupaten Nunukan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan lapangan bagi masyarakat. Sehingga hal ini mempengaruhi pada kenaikan jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Nunukan. Selain itu, adanya faktor tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

### 5. Kondisi Tingkat Kemiskinan

Sama halnya dengan pengangguran, permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Nunukan dari tahun 2015 hingga 2019 juga belum mampu terselesaikan. Hal ini merupakan ancaman pada kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat.

**Tabel 17.** Data Tingkat Kemiskinan Kabupaten Nunukan Pertahun

Ket.	Tingkat Kemiskinan (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kemiskinan	5,61	5,25	6,22	6,71	6,11

(Sumber:Badan Pusat Statistik)

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Nunukan tidak terpengaruh pada peningkatan pendapatan penduduk dan peningkatan infrastruktur selama tahun 2015 hingga 2019. Sehingga Untuk tingkat kemiskinan Kabupaten Nunukan mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Masih tingginya angka kemiskinan dikarenakan faktor kualitas sumberdaya manusia seperti halnya tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan masih terdapat beberapa wilayah yang masih minim untuk mengakses infrastruktur. Menurut Giyarsih (2014) penyebab kemiskinan di Kabupaten Nunukan adalah minimnya/kurangnya *natural assets, human assets, physical assets, financial assets, dan social assets*. sehingga berdasarkan hal



tersebut maka diperlukan strategi guna mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nunukan.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, untuk evaluasi ketersediaan infrastruktur ekonomi di Kabupaten Nunukan, infrastruktur jalan dan perdagangan sudah memenuhi standar sedangkan untuk infrastruktur listrik dan air bersih secara keseluruhan belum mampu untuk memenuhi standar ketersediaan infrastruktur. Untuk evaluasi ketersediaan infrastruktur sosial, sarana SMP dan perguruan tinggi sudah memenuhi standar ketentuan minimal sedangkan pada sarana SD dan SMA/SMK belum memenuhi standar minimal. Untuk sarana rumah sakit, puskesmas dan posyandu sudah melebihi standar minimal sedangkan klinik/praktek dokter belum memenuhi jumlah minimal ketersediaan sarana

Untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Nunukan, jumlah pekerjaan masyarakat selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Begitu juga tingkat pendidikan, jumlah masyarakat yang bersekolah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk tingkat pendapatan masyarakat selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. tingkat pengangguran memiliki pola naik turun sejak tahun 2015 hingga 2019. Pada tingkat kemiskinan sejak tahun 2015 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan.

#### 5. REFERENSI

- Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019. Badan Pusat Statistik.
- Giyarsih, S.R. (2014). Pengentasan Kemiskinan yang Komprehensif di Bagian Wilayah Terluar Indonesia - Kasus Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 21(2), 239–246.  
<https://doi.org/10.22146/jml.18549>
- Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2016-2020. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan.
- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal.

- Kessides, C. (1993). *The contributions of infrastructure to economic development : a review of experience and policy implications* (English). World Bank discussion papers ; no. WDP 213 Washington, D.C. : World Bank Group.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan
- Prasetyo, B.A., Priyarsono, D.S., & Mulatsih, S. (2013). Infrastructure, economic growth and inequality in Indonesia land borders. *Economic Journal of Emerging Markets*, 5(2), 99-108.  
<https://doi.org/10.20885/ejem.vol5.iss2.art3>
- Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka Kalimantan Utara Tahun 2016-2020. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara.
- Sari, U. C., & Rahman, B. (2019). Studi Literatur: Kajian Geoteknik Daerah Perbatasan sebagai Salah Satu Faktor dalam Penguatan Infrastruktur Daerah Perbatasan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Planologi*, 16(1), 32.  
<https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i1.4320>
- SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan